

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang sangat krusial dimana pendidikan merupakan kunci sukses kemajuan suatu bangsa, dengan pendidikan dapat menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas dan memiliki daya saing. Pendidikan sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana dalam Islam pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang hukumnya fardu ain, artinya pendidikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing umat manusia dan ketika menjalankannya mendapatkan pahala. Sebagaimana tercantum dalam Q.S At-Taubah : 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib dan lebih utama daripada pergi ke medan perang. Maka dari itu pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena melibatkan banyak masyarakat (Muchlisin, n.d.). Segala sesuatu yang berkaitan dan melibatkan

masyarakat merupakan kewajiban pemerintah untuk mengaturnya. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik karena mengatur kegiatan masyarakat. Menurut Tilaar dalam (Solichin, 2015) kebijakan pendidikan yaitu merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Kualitas pendidikan tentunya setiap negara berbeda-beda tergantung dengan kualitas sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alamnya.

Indonesia termasuk negara berkembang yang mana pendidikannya menduduki peringkat ke 54 dari 78 Negara pada tahun 2021 berdasarkan *World Population Review Education Rankings by Country*. Hal tersebut membuktikan bahwa di Indonesia pendidikannya masih tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya. Kualitas pendidikan suatu bangsa salah satunya dapat dilihat dari rata-rata lamanya sekolah, Indonesia sendiri pada tahun 2018 rata-rata lama sekolahnya 9 tahun sedangkan pada tahun 2015 kebijakan wajib belajar 12 tahun sudah diberlakukan. Maka adanya ketidaktercapaian atau tidak terimplementasikannya kebijakan tersebut.

Faktor yang menjadikan pendidikan Indonesia masih tertinggal yaitu belum meratanya pendidikan di seluruh wilayah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai negara yang memiliki pulau-pulau menyebabkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas terutama di wilayah luar pulau Jawa. Kedua yaitu karena masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pendidikan, yang mana fasilitas yang berkualitas tentunya akan mendukung proses belajar mengajar yang kondusif. Ketiga yaitu rendahnya

kualitas sumber daya manusia, yang mana tidak semua guru yang mengajar memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang. Dalam administrasi publik dijelaskan bahwa kualitas suatu pegawai bisa dikatakan baik ketika sesuai dengan tempatnya, yang dimana seringkali diistilahkan dengan “*the right man on the right place*”. Sedangkan menurut Martinus Turkinan dalam (Sabillah, 2021) semakin berkualitas pendidikan disuatu negara, maka semakin berkualitas pula kualitas sumber daya manusia.

Jawa Barat termasuk provinsi pulau Jawa dimana disana adalah pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi rata-rata lama sekolah secara keseluruhan belum mencapai 12 tahun wajib belajar (Wardhana, Kharisma, & Lingga, 2020). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat belum optimal dalam menyelesaikan masalah pendidikan terutama dalam permasalahan anak putus sekolah, dimana angka anak putus sekolah masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, sebagaimana data berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Sekolah
Tingkat Provinsi Tahun Ajaran 2020/2021

No.	Provinsi	Jumlah Anak Putus Sekolah		
		SD	SMP	SMA
1.	Jawa Barat	6.873	1.256	1.097
2.	Jawa Tengah	3.992	1.053	172
3.	Jawa Timur	3.436	1.335	544
4.	DKI Jakarta	5.760	850	1.397

Sumber: Statistik Data Kemendikbud (Kemendikbud, 2020)

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang angka putus sekolahnya masih tinggi, hal tersebut dapat terjadi karena penduduk antara Jawa Barat dengan daerah pembanding lainnya lebih padat. Tetapi disisi lain Jawa Barat merupakan pusat pertumbuhan ekonomi setelah Jakarta dan merupakan daerah yang pembangunannya lebih diperhatikan dibandingkan dengan luar jawa lainnya. Jika permasalahannya ada pada anggaran, seharusnya hal tersebut tidak lagi terjadi, karena sektor pendidikan sudah mempunyai anggaran yang khusus dari APBN dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 20% dana dari APBN atau APBD dialokasikan untuk pendidikan. Walaupun anggaran yang dikeluarkan sudah cukup memadai akan tetapi angka putus sekolah di Jawa Barat tergolong tinggi. Seperti yang tertulis dalam data berikut:

Tabel 1. 2

**Jumlah Sekolah di Jawa Barat Berdasarkan
Jenjang Sekolah Tahun Ajaran 2020/2021**

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah Putus Sekolah
1.	SD	6.030
2.	SMP	3.684
2.	SMA	1.581
3.	SMK	4.154
JUMLAH		15.449

Sumber : Statistik Data Kemendikbud (Kemendikbud, 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah di Jawa Barat jika dilihat dari jenjang SD ke SMP mengalami penurunan jumlahnya, begitupun dengan peralihan dari jenjang SMP ke SMA mengalami penurunan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah fasilitas. Fasilitas belajar yang lengkap, guru disediakan dan gedung dibuat sesuai dengan harapan supaya siswa bersemangat (Damanik, 2019). Meskipun secara bangunan fasilitas pendidikan di Jawa Barat sudah bagus tetapi pada sisi lain angka putus sekolah masih tinggi. Beberapa daerah di Jawa Barat yang sudah melaksanakan wajib belajar sembilan tahun diantaranya Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Majalengka, dan Cimahi, daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut sudah berhasil menerapkan wajib belajar sembilan tahun, dimana angka putus sekolahnya rendah dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan Kabupaten Sumedang angka putus sekolah tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah tersebut. Sebagaimana data berikut:

Tabel 1. 3

**Jumlah Anak Putus Sekolah Kabupaten/Kota
Berdasarkan Jenjang Tahun Ajaran 2020/2021**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah anak Putus Sekolah		
		SD	SMP	SMA
1.	Kabupaten Sumedang	105	20	10
2.	Kota Tasikmalaya	22	9	2
3.	Kota Cimahi	98	10	6
4.	Kabupaten Majalengka	130	21	12
5.	Kota Sukabumi	27	2	35

Sumber: Statistik Data Kemendikbud (Kemendikbud, 2020)

Data diatas menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak mengalami putus sekolah di Kabupaten Sumedang. Begitu pun dengan daerah pembanding juga belum sepenuhnya masih terdapat anak putus sekolah, tetapi jika dibandingkan dengan daerah-daerah tersebut angka anak putus sekolah di Kabupaten Sumedang lebih tinggi, meskipun jika dibandingkan dengan Kabupaten Majalengka angka anak putus sekolah Kabupaten Sumedang lebih rendah.

Sumedang merupakan kota yang dijuluki puser Budaya Sunda, hal tersebut dikarenakan adanya mahkota binokasi sebagai simbol mahkota Kerajaan Sunda, maka dari itu Sumedang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Karena Sumedang sebagai daerah yang masih berbahasa daerah dalam kegiatan sehari-harinya yaitu Bahasa Sunda, seperti pada umumnya para pelajar di Sumedang menggunakan Bahasa Sunda dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian karena Sumedang memiliki budaya yang beraneka ragam. Selanjutnya karena Sumedang banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam Budaya Sunda (Rizkinurman, 2013). Sumber informasi dalam pendidikan adalah adanya perpustakaan. Pendidikan yang berkualitas selalu didukung dengan perpustakaan yang mempunyai fasilitas yang lengkap (Inabah, 2020). Sedangkan pendidikan di Kabupaten Sumedang masih tergolong rendah mengapa demikian, bisa kita lihat dari perpustakaan umum hanya terdapat satu di Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditentukan dengan minat baca, tetapi sarana dan prasarananya tidak mendukung untuk meningkatkan minat baca pelajar. Kemudian jumlah sekolah secara keseluruhan dari berbagai jenjang di

Kabupaten Sumedang berjumlah 840 sekolah. Berikut data sekolah dilihat dari berbagai jenjang di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1. 4

Jumlah Sekolah Di Kabupaten Sumedang tahun 2020/2021

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah
1.	SD	602
2.	SMP	122
3.	SMA	27
4.	SMK	89
JUMLAH		840

Sumber : Open Data Kabupaten Sumedang (2021)

Jika dilihat dari data tersebut jumlah sekolah semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin sedikit jumlahnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor rendahnya angka melanjutkan pendidikan. Artinya adanya faktor fasilitas yang masih terbatas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak dalam melanjutkan pendidikan mendapatkan kendala salah satunya yaitu fasilitas gedung sekolah yang belum merata. Fasilitas yang lengkap untuk menunjang anak dalam pembelajaran dapat menjadi alasan anak-anak melanjutkan sekolah sehingga tidak terjadi adanya anak putus sekolah (Putri, Trisnarningsih, & Nugraheni, 2018). Sedangkan faktor lainnya yaitu kurangnya minat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan karena jarak dari rumah ke sekolah yang jauh dan kurangnya motivasi. Seperti disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan bahwa anak putus sekolah penyebabnya karena kurangnya motivasi anak dalam menyelesaikan

pendidikan dan jarak rumah yang jauh dengan sekolah. Motivasi menjadi faktor dalam anak putus sekolah karena motivasi dapat menyebabkan penentu anak putus sekolah atau menyelesaikan bahkan melanjutkan sekolah (Saepuloh & Suherman, 2018). Faktor eksternal anak putus sekolah karena lingkungan yang kurang mendukung seperti jarak rumah dengan sekolah yang jauh (Putri et al., 2018). Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan tingkat pendidikan yaitu:

Tabel 1. 5
Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020/2021

Penduduk tamat SD laki-laki	Penduduk tamat SD perempuan	Penduduk tamat SMP laki-laki	Penduduk tamat SMP perempuan	Penduduk tamat SMA laki-laki	Penduduk tamat SMA perempuan
171.145	195.552	103.772	105.783	121.579	97.446

Sumber : Open Data Kabupaten Sumedang (2020)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit pelajar yang melanjutkan pendidikannya. Terutama dari tingkat SD yang melanjutkan ke tingkat SMP mengalami penurunan yang signifikan. Begitupun dengan jenjang pendidikan SMA terutama pada perempuan yang mengalami penurunan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2020/2021

Jumlah penduduk 0-6 Tahun	Jumlah penduduk 7-12 Tahun	Jumlah penduduk 13-15 Tahun	Jumlah penduduk 16-18 Tahun
112.818	113.687	56.722	57.450

Sumber : Open Data Kabupaten Sumedang (2020)

Adapun jumlah pelajar berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 7

Jumlah Pelajar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020/2021

Jumlah Pelajar SD	Jumlah Pelajar SMP	Jumlah Pelajar SMA
103.336	42.763	17.086

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang (2020)

Dilihat dari data tersebut adanya penurunan jumlah pelajar, dimana kebanyakan pelajar tidak melanjutkan sampai jenjang pendidikan SMA. Dari data tabel 1.3 jumlah penduduk berusia 13-15 tahun sebanyak 56.722 orang yang dimana pada usia tersebut masuk dalam jenjang pendidikan SMP sedangkan jumlah pelajar SMP berjumlah 42.763 pelajar. Artinya masih adanya pelajar yang putus sekolah hanya sampai SMP. Dan dilihat dari jumlah penduduk yang berusia 16-18 tahun adalah 57.450 orang, rentang usia 16-18 tahun adalah usia pelajar

SMA, sedangkan jumlah pelajar SMA 17.086 siswa. Maka dari itu kebanyakan anak-anak di Kabupaten Sumedang hanya sekolah sampai SMP.

Kemudian permasalahan lainnya yaitu faktor Sumber daya manusia juga menjadi pengaruh, dimana guru atau tenaga pendidik harus terus ditingkatkan kualitasnya. Seperti ketika masa Covid-19 masih banyak guru yang belum mengenal dan menguasai teknologi, hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, oleh sebab itu adanya diklat TIK bagi para guru di Kabupaten Sumedang yang langsung diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang (Kamaludin, 2021).

Lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap semangat anak-anak dalam belajar, selain itu juga secara sosial dapat meningkatkan keaktifan dan keefektifan dalam proses pembelajaran (Damanik, 2019). Lingkungan mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan dalam proses pembelajaran, maka dari itu lingkungan belajar harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tetapi di lingkungan Kabupaten Sumedang masih terdapat kasus kekerasan dan penyimpangan pada anak. Bisa di lihat dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang terdapat 23 kasus kekerasan dan penyimpangan terhadap anak sejak tahun 2019-2020. Kasus tersebut diantaranya tindakan eksploitasi, pelecehan seksual, pencabulan, dan percobaan pemerkosaan terhadap anak (Redaksi, 2021). Dengan adanya hal tersebut tentunya Pemerintahan Kabupaten Sumedang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang harus mengambil langkah dan solusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan penyimpangan pada anak sehingga mereka tidak putus sekolah dan tidak lagi terjadi lagi kasus serupa.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan adanya kebijakan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dimana sebelumnya diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah sebelumnya dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut mengalami perubahan karena belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan yang dinamis sehingga setiap perubahannya menyesuaikan dengan perubahan di lingkungan. Kemudian Provinsi Jawa Barat juga mengatur Penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sesuai dengan konsep otonomi daerah bahwa daerah dapat mengurus daerahnya masing-masing dan mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya, untuk mencegah keresahan dalam bidang pendidikan maka Pemerintahan Kabupaten Sumedang memberikan perhatiannya terhadap bidang pendidikan dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Maka dari itu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Sebagaimana menurut Mark dan Anne kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global. Sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era

globalisasi. Karena globalisasi membawa nilai demokrasi dan demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (H.A.R & Nugroho, 2016). Suatu kebijakan dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat, dimana suatu kebijakan tentunya saling berkaitan antar *stakeholder*. Dengan adanya permasalahan pendidikan di Kabupaten Sumedang seperti halnya mayoritas pelajar menyelesaikan pendidikannya hanya sampai tingkat SMP. Hal tersebut terjadi karena kurangnya motivasi belajar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu diperlukan kebijakan yang benar-benar diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan masyarakat.

SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung terhadap permasalahan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan, yang dimana Dinas Pendidikan berupaya untuk membuat berbagai program sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sektor pendidikan itu merupakan tugas dinas pendidikan sehingga permasalahan mendapatkan soluitf. Salah satunya permasalahan anak putus sekolah sebagaimana PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan pendidikan minimal bagi masyarakat (Mariana, 2022). Maka dari itu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berperan penting dalam mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Sumedang, hal tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya yang dimana sebagai penanggungjawab secara langsung atas permasalahan pendidikan, maka dari itu dengan adanya dinas pendidikan merupakan SKPD yang dapat menangani

permasalahan anak putus sekolah. Berdasarkan dengan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “Strategi Pencegahan Anak Putus Sekolah Melalui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sumedang”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori strategi pemerintah menurut (Mulgan, 2009) dengan dimensi : *Purpose, Environment, Directions, Actions, dan Learning*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Masih terdapatnya angka putus sekolah di Kabupaten Sumedang yang memiliki potensi kurang berkualitasnya sumber daya manusia. Maka tujuan dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya terlaksana.
2. Lingkungan belajar yang belum sepenuhnya nyaman dan aman bagi anak-anak karena masih terdapatnya kasus kekerasan dan penyimpangan terhadap anak.
3. Belum maksimalnya Dinas Pendidikan sebagai SKPD dalam mengatasi anak putus sekolah.
4. Kurangnya tindakan kreatif yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam mengatasi anak putus sekolah.

5. Evaluasi yang dilakukan perlu dilakukan guna terpecahkannya permasalahan anak putus sekolah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah peneliti jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana strategi pencegahan anak putus sekolah melalui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumedang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan anak putus sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melalui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumedang serta untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambatnya.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan anak putus sekolah dan juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana strategi pencegahan anak putus sekolah dan juga kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu penulis berharap wawasan tersebut

dapat digunakan dalam pembelajaran dan acuan, referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sumedang agar terus memberikan dukungan kepada anak-anak dalam belajar sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang semakin baik.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai gambaran untuk lebih peduli terhadap pendidikan terutama pendidikan yang ada di Kabupaten Sumedang yang memerlukan perhatian dari segi kualitas serta adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam meningkatkan fasilitas sekolah dan menjamin pendidikan anak-anak sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian diperlukan sebuah teori yang mendukung dan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti sehingga kebenarannya tidak diragukan. Dalam penelitian ini terdiri dari: *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*.

Pertama, *Grand Theory*, teori yang digunakan yaitu kebijakan publik menurut (Anggra, 2018) bahwa kebijakan publik adalah:

- a. Kebijakan publik, merupakan sebuah keputusan berdasarkan atas jumlah atau langkah-langkah pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Pelaku kebijakan adalah orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam kebijakan karena aktor kebijakan berada dalam posisi mempengaruhi, mulai dari perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan maupun pengawasan.
- c. Lingkungan kebijakan adalah suatu keadaan yang menjadi latar belakang atau keadaan yang dapat menimbulkan permasalahan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan.

Kedua, *Middle Theory*, teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan publik menurut (Anggara, 2014) implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu kegiatan dengan adanya sarana dan prasarana untuk mendapatkan suatu hasil. Implementasi dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah diputuskan dan disetujui untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Menurut Edward dalam (Anggra, 2018) implementasi kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila ada empat variabel dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. *Communications* (Komunikasi), menunjukkan peran penting sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui secara keseluruhan apa yang akan dikerjakan. Ini menandakan bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan

dengan perintah dari atasan kepada pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan sesuai dengan sasaran dari kebijakan tersebut. Maka dari itu komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten.

- b. *Resources* (Sumber daya), dalam sumber daya tidak hanya mencakup faktor sumber daya manusia atau aparat tetapi mencakup sumber daya materil lainnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang efektif.
- c. *Dispositions atau attitudes* (sikap), disposisi atau sikap pelaksana yang berarti sebagai keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus dikerjakan tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan. Maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.
- d. *Bureaucratic structure* (Struktur birokrasi), struktur birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan artinya penerapan kebijakan tidak dapat berhasil apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Ada dua karakteristik birokrasi secara umum yaitu, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin dan pertanggungjawaban berbagai unit organisasi.

Ketiga, *Applied Theory*, teori yang digunakan yaitu teori strategi pemerintah yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) yang menyatakan bahwa “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Maksudnya bahwa strategi yang digunakan untuk organisasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dimana strategi berguna untuk sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada dengan melalui organisasi publik yang pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan publik. Adapun indikator-indikator dalam strategi pemerintah yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) yaitu:

1. *Purpose* (Tujuan), dalam menentukan sebuah strategi tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas yang terencana dan juga sesuai dengan kesepakatan, karena konteksnya strategi pemerintahan, maka tujuannya harus sesuai kebutuhan publik dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. *Environment* (Lingkungan), lingkungan tentunya mempengaruhi strategi yang seperti apa dan bagaimana yang dibutuhkan oleh lingkungan tersebut.
3. *Direction* (Pengaruh), pengaruh disini maksudnya lembaga atau organisasi yang bertanggungjawab secara langsung terhadap strategi yang akan dilakukan.
4. *Actions* (Tindakan), dalam tindakan tentunya sebagai langkah untuk mengambil suatu tindakan yang akan dilakukan.
5. *Learning* (Pembelajaran), pembelajaran sebagai alat pembanding dan juga sebagai perumusan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang terjadi.

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

